

Abstrak

Dalam situasi pasca konflik, perempuan dapat dengan mudah berbaur dengan masyarakat yang rentan, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Merespon pergeseran dalam definisi keamanan yang melibatkan nilai-nilai pengarusutamaan gender dalam sektor keamanan, PBB mereformasi operasi pemeliharaan perdamaian agar lebih responsif gender dan mendorong setiap negara untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam UN PKO, termasuk Indonesia. Sayangnya, meskipun Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan kontribusi pasukan terbanyak, masih terdapat ketimpangan gender di dalam pasukan Kontingen Garuda baik secara kualitas dan kuantitas. Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisis mengapa terjadi ketimpangan gender Kontingen Garuda. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang didapatkan dari data primer dan sekunder, dan juga wawancara. Selanjutnya, untuk dapat menjawab rumusan masalah, penelitian menggunakan kacamata teori feminisme. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa secara kuantitas faktor yang menyebabkan terjadinya rendahnya partisipasi perempuan dalam Kontingen Garuda adalah pembatasan peran perempuan dalam sektor militer yang diatur dalam perundangan, ketiadaan target numerik pengiriman personel perempuan, sedikitnya jumlah personel wanita TNI dan minimnya informasi terkait perekrutan Kontingen Garuda. Sementara itu, faktor yang menyebabkan terjadinya gender gap dalam Kontingen Garuda adalah maskulinitas institusi TNI, adanya isu kepemimpinan, dan ketiadaan jaminan karir bagi personel perempuan.

Kata kunci: Feminisme, *Gender gap*, Ketimpangan gender, Kontingen Garuda, Pemeliharaan perdamaian, Personel perempuan.

Abstract

In post-conflict situations, women can easily blend into vulnerable communities, and are more responsive to community needs, especially women and children. Responding to the shift in the definition of security involving mainstreaming gender values in the security sector, the United Nations reformed peacekeeping operations to be more gender responsive and encouraged every country to increase women's participation in UN PKO, including Indonesia. Unfortunately, even though Indonesia is included in the top 10 countries with the most troop contributions, there is still a gender imbalance within the Garuda Contingent's troops both in quality and quantity. Therefore, this study analyses why there is gender inequality in the Garuda Contingent. This research was conducted using qualitative research methods, with data collection techniques obtained from primary and secondary data, as well as interviews. Furthermore, to answer the research questions, this research uses feminism theory. This research found that the factors causing the low participation of women in the Garuda Contingent were the restrictions on the role of women in the military sector which were regulated in law, the absence of a numerical target for sending female personnel, the small number of female TNI personnel and the lack of information related to the recruitment of the Garuda Contingent. Meanwhile, the factors causing the gender gap within the Garuda Contingent are the masculinity of the TNI institution, the existence of leadership issues, and the lack of career guarantees for female personnel.

Keywords: Female personnel, Feminism, Gender gap, Gender inequality, Garuda Contingent, Peacekeeping.